



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,  
BUMN, DAN INVESTASI**

---

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Panja PMN 2019 Komisi VI DPR RI dengan Sekretaris Kementerian BUMN, para Deputi Kementerian BUMN, serta para Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)
Sifat Rapat	: Terbuka
Rapat ke	: 27 (dua puluh tujuh)
Hari/Tanggal	: Rabu, 11 Juli 2018
Waktu	: Pukul 14.30 s.d. 15.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI.
Ketua Rapat	: Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FGerindra); didampingi oleh:
Sekretaris Rapat	: Eguh Setiawan, S.IP. (a.n. Kabag Set. Komisi VI DPR RI, Kasubag Rapat)
Acara	: Membahas Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN Tahun 2019
Hadir	: 1. 17 dari 31 Anggota Panja PMN 2019 Komisi VI DPR RI; 2. Sekretaris Kementerian BUMN dan para Deputi Kementerian BUMN beserta jajaran; 3. Para Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) beserta jajaran.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja PMN 2019 Komisi VI DPR RI dengan Sekretaris Kementerian BUMN, para Deputi Kementerian BUMN, serta para Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) dibuka pukul 14.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda rapat adalah membahas usulan penambahan PMN pada BUMN Tahun 2019.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Sekretaris Kementerian BUMN, para Deputi Kementerian BUMN, serta para Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) untuk menjelaskan mengenai usulan penambahan PMN pada BUMN Tahun 2019.

4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan atas penjelasan Sekretaris Kementerian BUMN, para Deputi Kementerian BUMN, serta para Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Utama Karya (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero).

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Panja PMN 2019 Komisi VI DPR RI menerima usulan penambahan PMN BUMN Tahun 2019 berdasarkan surat Menteri BUMN RI Nomor S-376/MBU/06/2018 tanggal 5 Juni 2018, diberikan kepada:

- a. PT PLN (Persero) sebesar Rp15 Triliun (secara Tunai) dengan rencana penggunaan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha guna pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
- b. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp12,5 Triliun (secara Tunai) dengan rencana penggunaan untuk percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
- c. PT PANN (Persero) untuk restrukturisasi hutang *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) (secara Non Tunai), yakni Konversi Hutang Pokok SLA menjadi PMN sebesar Rp2,3 Triliun, dan Penghapusan Bunga Denda sebesar Rp1,8 Triliun.

Selanjutnya, hasil pembahasan mengenai usulan penambahan PMN kepada BUMN Tahun 2019 akan disampaikan Panja PMN 2019 Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN guna pengambilan keputusan agar dapat disampaikan kepada Badan Anggaran sebagai bahan penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2019.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.50 WIB.